

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pada Badan Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesbangpol melalui capaian-capaian tahunan, termasuk

capaian kinerja strategis tahun 2019. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat di tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Padang, 31 Desember 2019

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA**



NAZWIR, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, tentram, aman dan damai, Badan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Visi tersebut yakni "Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Aman, Demokratis, Bersatu Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.". Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah " Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional, mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat dan meningkatkan stabilitas politik di Sumatera Barat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Sumatera Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu *Pertama* ; Meningkatnya kinerja organisasi; *Kedua* : Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat; Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran *Pertama adalah* Meningkatnya tata kelola organisasi; *Kedua* ; Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; *Ketiga* : Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.

Program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh laporan kinerja tahun 2019 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 4 (empat) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 6.658.985.482,- direalisasikan sebesar Rp. 6.510.963.435 atau 97,78 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 2,22% atau secara absolute sebesar Rp. 148.022.047,-
4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Memberdayakan segala potensi yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 - c. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol	3
1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	12
1.5. Isu Strategis	12
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021	16
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021	22
2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	24
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	27
3.3. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2019	30
3.4. Realisasi Anggaran	78
BAB. IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai	7
Tabel 1.2	Daftar Golongan Pegawai	8
Tabel 1.3	Daftar Pegawai Perbidang	9
Tabel 1.4	Daftar Aset	10
Tabel 1.4	Daftar Kendaraan Dinas	11
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.3	Rencanan Kerja Tahunan Tahun 2019	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	25
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tahun 2019	27
Tabel 3.2	Hasil pengukuran kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2019	27
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d 2019	29
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	31
Tabel 3.5	Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2019	34
Tabel 3.7	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2019	35
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	37
Tabel 3.8	Perbandingan nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan-RB dengan kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2019	37
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	39
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	45
Tabel 3.12	Jumlah Konflik Sosisal di Sumatera Barat	48
Tabel 3.13	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2016-2019	50
Tabel 3.14	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	51
Tabel 3.15	Perbandingan jumlah angka kriminalitas di Sumatera Barat tahun 2015-2019	56
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar	

Tahun 2016-2019	57
Tabel 3.17 Realisasi dan Capaian Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2019	58
Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	60
Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Saasaran Meningkatnya Kemanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	62
Tabel 3.20 Capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis III	68
Tabel 3.21 Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	70
Tabel 3.22 Perbandingan Nilai IDI di Sumbar	72
Tabel 3.23 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai IDI di Sumbar Tahun 2016-2019	73
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	74
Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	76
Tabel 3.26 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Prov.Sumbar tahun 2019	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	7
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Per Bidang Tahun 2019	9
Grafik 3.1	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016-2019	29
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019	33
Grafik 3.3	Nilai Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2019	35
Grafik 3.4	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2019	36
Grafik 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2019	47
Grafik 3.6	Perbandingan Jumlah Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2016-2019	49
Grafik 3.7	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2016-2019	50
Grafik 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2019	56
Grafik 3.9	Perbandingan Jumlah Kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2019	57
Grafik 3.10	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2019	58
Grafik 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2019	59
Grafik 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2019	69
Grafik 3.13	Perbandingan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2019	72
Grafik 3.14	Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar Tahun 2016-2019	74

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang

dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
3. Bidang Idiologi dan Wasbang :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi

- 2) Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan :
 - 1) Sub Bidang PAM dan Waspadnas
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
 - 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya & Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
 - 2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional

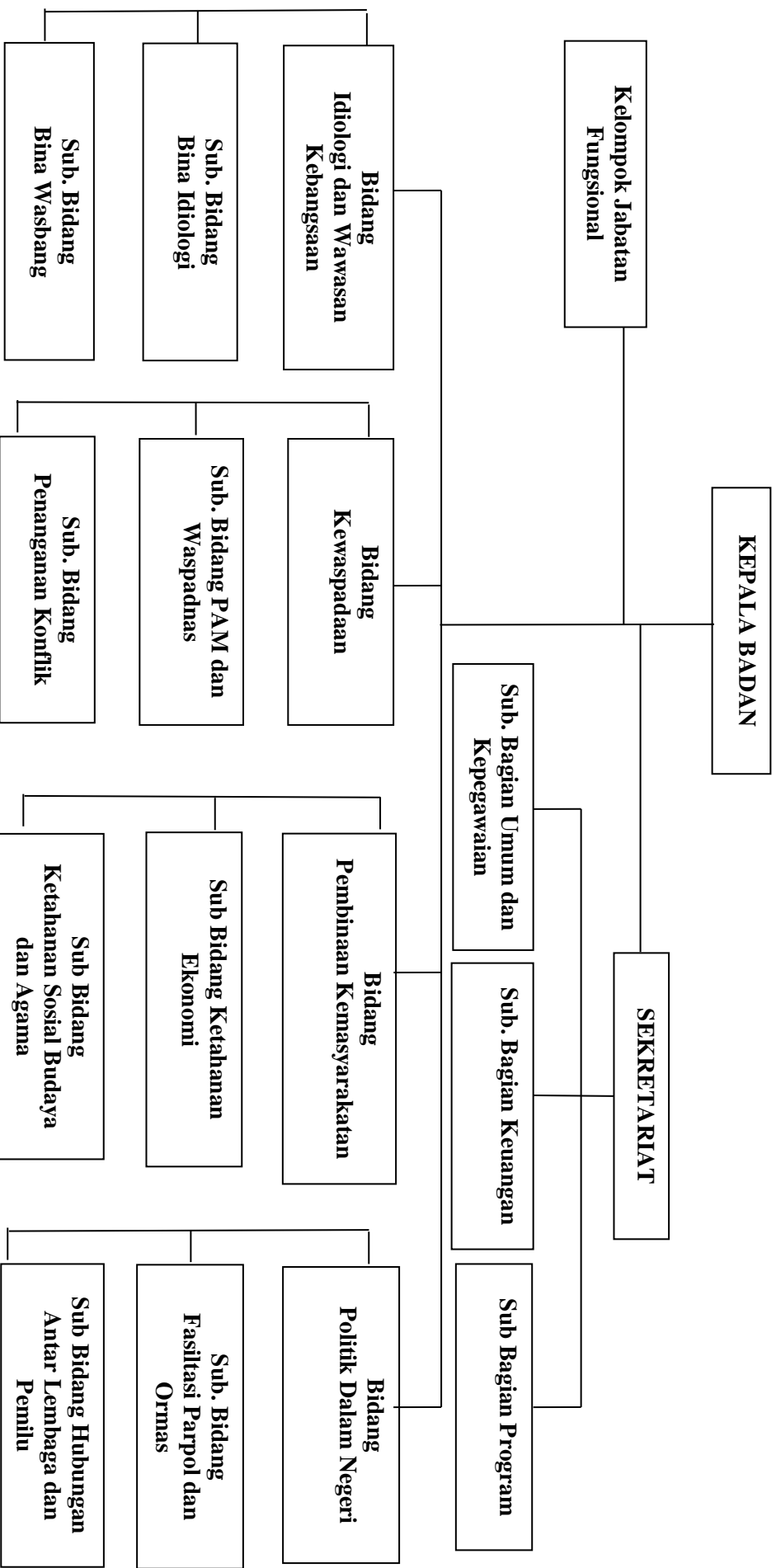
Pada tahun 2019 ini, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016. Dalam Perda tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Pada laporan kinerja ini, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

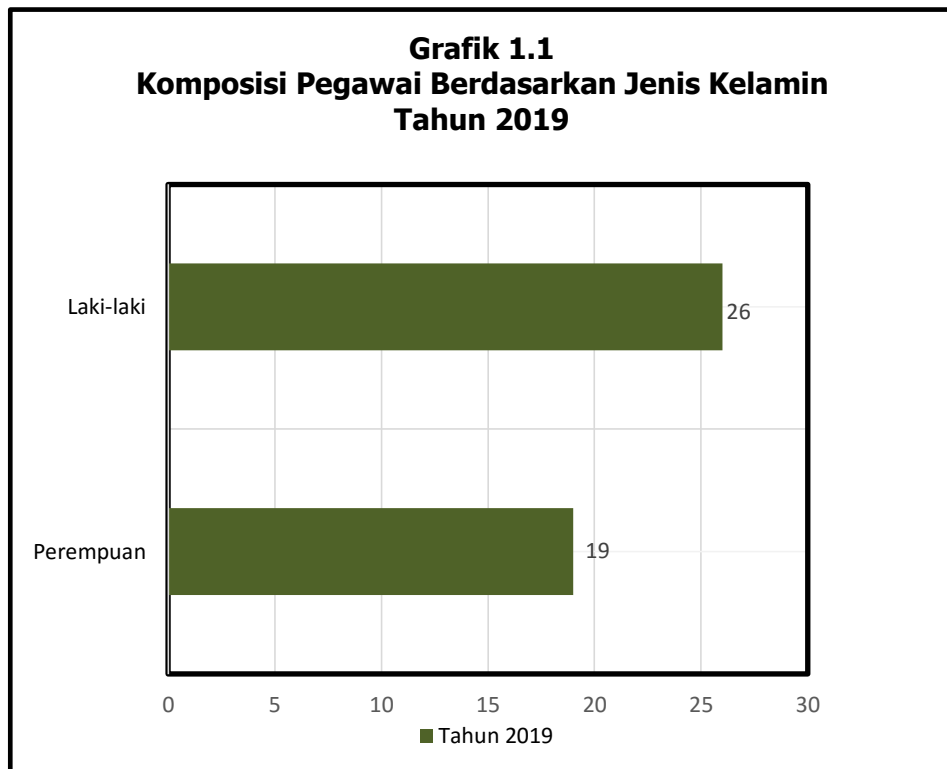
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat



1.3.3 Sumber Daya Badan Kesbangpol

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 45 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 19 orang (42.22 %) perempuan dan 26 orang (57.78 %) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 24,44% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.



Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

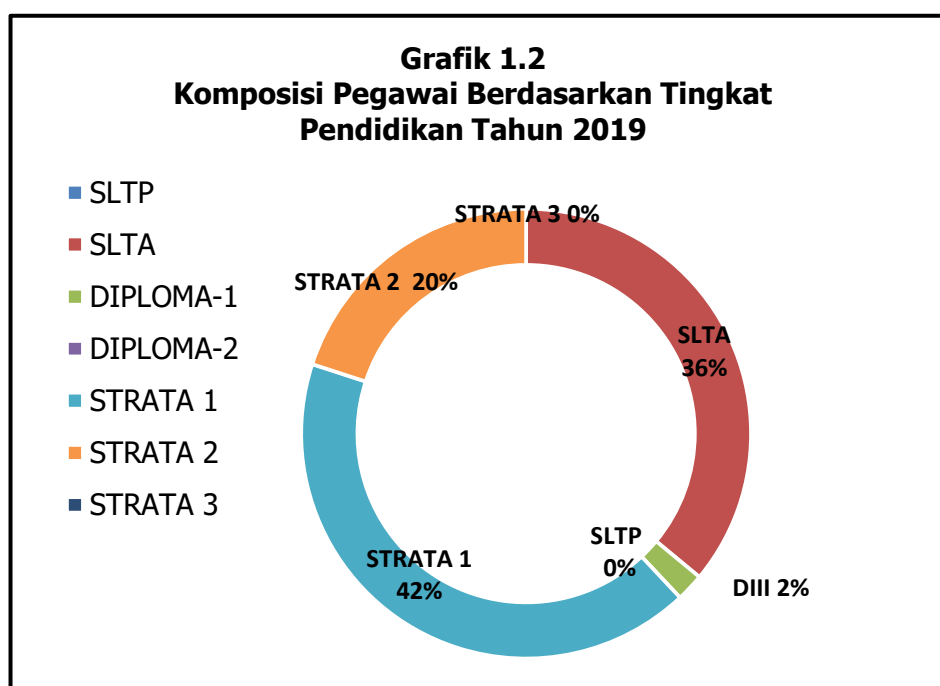
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kesbangpol
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	16	36%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	2%
4	STRATA 1	19	42%
5	STRATA 2	9	20%
6	STRATA 3	0	0%
	JUMLAH		100%

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol 62% pegawai sudah berpendidikan sarjana, 2% Diploma, namun sebanyak 36% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:



Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

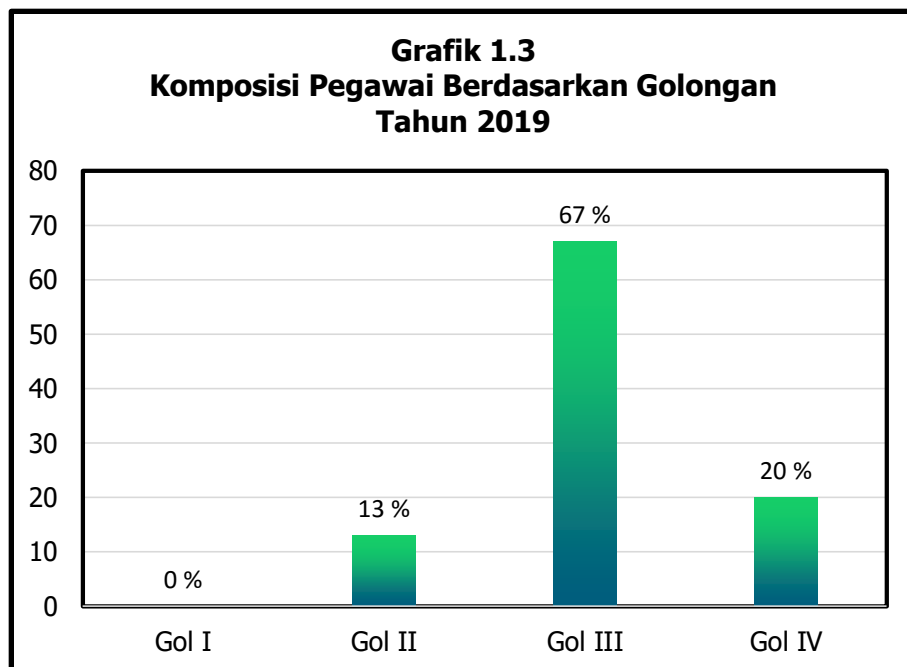
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai Badan Kesbangpol
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	13%
3	Golongan III	30	67%
4	Golongan IV	9	20%
	JUMLAH	45	100%

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 67% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Badan Kesbangpol per golongan:



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Komposisi pegawai pada masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah:

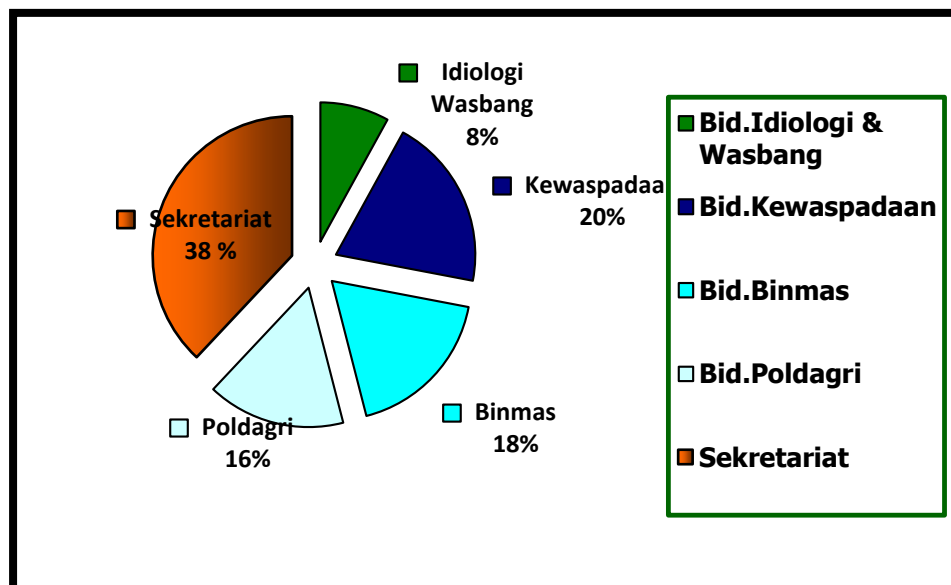
Tabel 1.3.
Daftar Pegawai Per Bidang pada Badan Kesbangpol
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	Bidang	Jumlah	Persentase
1.	Sekretariat	17 orang	38%
2.	Bidang Idiologi & Wasbang	4 orang	8%
3.	Bidang Kewaspadaan	9 orang	20%
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	8 orang	18%
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	7 orang	16%
	JUMLAH	45 orang	100%

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 38% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang 20% ke bawah. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol. Secara grafik komposisi pegawai per bidang dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 1.4.
Komposisi Pegawai Per Bidang
Tahun 2019



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

1.3.3.2 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 11.973.938.770,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 5.314.953.288,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 6.658.985.482,-**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2019 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.926.868.120,- (92,70%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 6.510.963.435,- (97,78%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2019 sebesar **Rp. 11.437.831.555,- (95,52%)**.

1.3.3.3 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Badan Kesbangpol per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.866.935.063,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 6.866.935.063,- dan aset lainnya Rp. 0,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Daftar Aset Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Per Desember 2019

No	Jenis Barang	Jumlah
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	4.535 m ²
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat angkutan - Komputer - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat laboratorium	7 unit 60 unit 222 unit 7 unit 1 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	774 m ²
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak bermanfaat	- unit

Sumber : Kartu Inventaris Barang Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

1.3.3.4 Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang memadai untuk menampung pelaksanaan tugas karena belum adanya ruang rapat/aula yang representatif untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol Prov Sumbar. Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saat ini juga belum memiliki ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, dan mushalla yang memadai.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang kewaspadaan, bidang ideologi dan wasbang, bidang politik dalam negeri dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.5.
Daftar Kendaraan Dinas
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Pajero	Operasional Ka. Badan
2	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
3	Mobil	Isuzu Panther	Operasional Administrasi
4	Mobil	APV	Operasional Administrasi
5	Mobil	Ford Everest	Operasional Administrasi
6	Sepeda Motor	Supra X	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Vario	Operasional Administrasi

Sumber : Data asset Badan Kesbangpol Tahun 2019

1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

1.5 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di daerah, masih banyak potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada. Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah, Badan Kesbangpol perlu meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Selain itu, perlu koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda dan Tim Kominda Sumbar untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan Pemilukada Serentak di 13 Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan persoalan politik yang perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu tahun 2019 dan Pemilukada tahun 2020, perlu kesadaran dan pemahaman politik masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan damai pada saat pelaksanaan Pemilu, perlu dilakukan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.
3. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
4. Masih tingginya angka kriminalitas di Sumbar khususnya di daerah perkotaan. Untuk tahun 2019 tercatat 9.236 kasus kriminalitas terjadi di Sumbar. Kasus yang paling banyak terjadi diantaranya curat dan curanmor yang jumlahnya lebih dari 2.000 kasus per tahun. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya serius untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan agar angka kriminalitas di Sumbar dapat berkurang.
5. Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini perlu diantisipasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan bagi masyarakat khususnya generasi muda terkait bahaya perbuatan maksiat. Perlu juga disusun regulasi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku maksiat tersebut.

6. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah pasca direvisinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan ditundanya pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum hingga batas waktu yang tidak ditentukan yang pada akhirnya bermuara pada tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Persoalan tersebut diantaranya :
 - a. Terdapat beberapa keraguan sebagian pemerintah daerah dalam memposisikan status Kelembagaan Kesbangpol, mengingat ketidakjelasan struktur dan tugas fungsi Kesbangpol di daerah pasca restrukturisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
 - b. Ketidakjelasan status Kelembagaan Kesbangpol di daerah apakah perangkat daerah atau bukan, mengingat berdasarkan Pasal 122 merupakan Perangkat Daerah sementara berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tidak ada lagi urusan kesatuan bangsa dan politik
 - c. Tidak terakomodirnya pelaksanaan program prioritas di daerah yang berkaitan dengan substansi urusan pemerintahan umum termasuk antisipasi persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020
 - d. Masih terdapat perangkat daerah Kesbangpol yang bergabung dengan Sekretariat Daerah atau bergabung dengan Perangkat Daerah lain dalam bentuk Bidang, Sub Bidang maupun Sub Bagian.
 - e. Terjadinya penurunan anggaran Kesbangpol yang signifikan, sehingga menurunkan kinerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2019. Capaian Kinerja (*performance results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2019, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Memuat perencanaan strategis 2016-2021, indikator kinerja utama 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan 2019 dan perjanjian kinerja tahun 2019.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

4. BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021

Di antara misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Untuk mencapai misi tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat. Dari 2 sasaran tersebut, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar selama periode 5 tahun (2016-2021) yaitu meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Pencapaian tujuan didukung oleh beberapa sasaran dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol tahun 2016-2021.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi

tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, khususnya di bidang kasatuan bangsa dan politik.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Garis besar Perencanaan Strategis (Rsnstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMATERA
BARAT YANG AMAN, DEMOKRATIS, BERSATU
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945**

2.1.2 Misi

Untuk dapat mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 2) Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Aman, Demokratis, Bersatu Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi
2	Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat	Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 disusun strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi dari keberadaan/ kehadiran orang asing di Sumatera Barat
3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama
5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
6. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.
7. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat.
9. Meningkatkan pengetahuan aparat, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
10. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.
11. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM
12. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik.
13. Mendewasakan sikap dan prilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
14. Meningkatkan koordinasi terkait isu isu strategis di jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota
15. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparat
16. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
17. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparat
18. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
19. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparat pengadaan barang dan jasa
20. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.
2. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat-rapat pembahasan keberadaan orang asing.
3. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat

4. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan
7. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
8. Memberikan sosialisasi tentang nilai nilai luhur bangsa
9. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
12. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat
13. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
14. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran Kesbangpol dan Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Barat
15. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)
16. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
17. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
18. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
19. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement
20. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.5 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi pertama RPJMD 2016-2021 yaitu " Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penanganan Masalah Strategis Daerah
 - b. Pengawasan Orang Asing
 - c. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
 - d. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - e. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya
 - f. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - g. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
 - h. Forum Diskusi Pimpinan Daerah
 - i. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar
 - j. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat
 - k. Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan Budaya
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat
 - c. Penguatan Wawasan Bela Negara
 - d. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
 - e. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
 - f. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - g. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
 - h. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
 - i. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat
 - b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - c. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
 - d. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
 - l. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum
 - m. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten/kota di Sumbar

- e. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
 - f. Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
4. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - b. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
 - c. Sosialisasi Perda Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
 5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Badan Kesbangpol telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT),

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2016-2021 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Indeks Ketahanan Nasional	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	60	68	70	72	74	76

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	a Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	b Jumlah penurunan konflik sosial di Sumbar c Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	d Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	72

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	72

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.208.116.854	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	354.415.000	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.750.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.275.300	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	791.699.006	APBD
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	310.708.000	APBD
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.546.443.599	APBD
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	811.612.700	APBD
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.294.461.200	APBD
10	Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	173.503.823	APBD
JUMLAH		6.658.985.482	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (76)	B(67,66)	89,03%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					89,03
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%	3 13,64%	140% 272,8%
Rata-rata Persentase Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					206,4%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	72	67,06	93,14%
Rata-rata Persentase Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat					93,14%

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu ketiga sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Baik**" dengan nilai 89,03% untuk sasaran 1, 206,4% untuk sasaran 2 dan 93,14% untuk sasaran 3. Capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi.

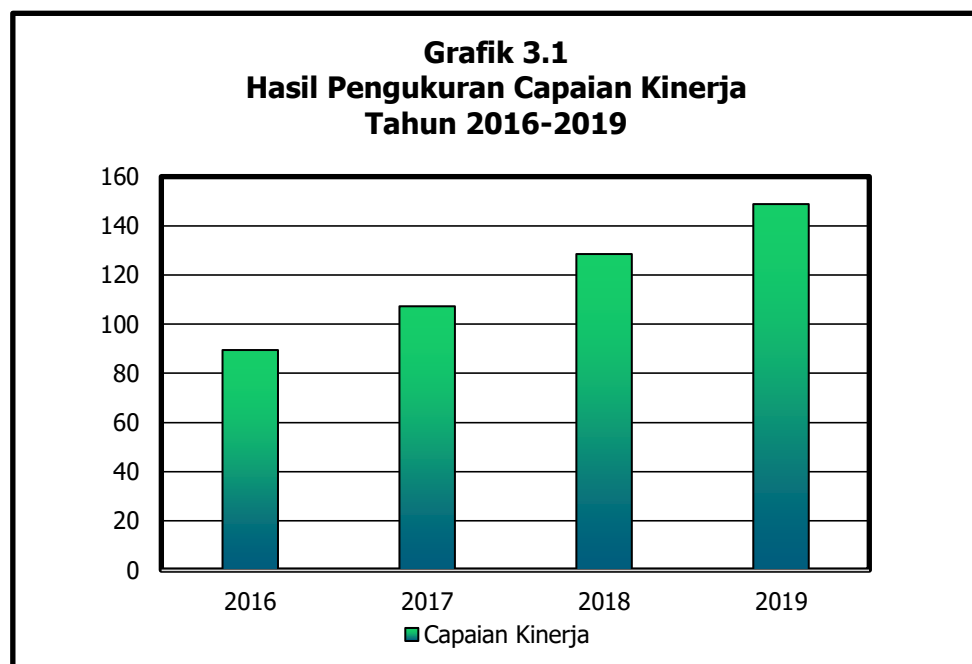
Terhadap berbagai target capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi progress capaian kinerja yang dicapai agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Salah satu indikator kinerja yang belum mencapai target adalah indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja. Setiap aspek atau komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja perlu ditingkatkan capaiannya dan dilakukan evaluasi secara terus menerus.

Jika dibandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan rata-rata capaian kinerja sasaran setiap tahunnya dari tahun 2016 s/d tahun 2019 yaitu sebesar 89,41% tahun 2016, 107,20% tahun 2017, 128,43% tahun 2018, dan 148,78% tahun 2019. Namun, untuk realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2016 s.d tahun 2019, ada beberapa indikator kinerja yang realisasi kerjanya mengalami kenaikan setiap tahunnya dan ada juga beberapa indikator kinerja yang realisasi kerjanya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Indikator kinerja yang realisasinya mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas. Sedangkan indikator kinerja yang realisasinya berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, jumlah konflik sosial di Sumbar dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2016 s/d 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA				% CAPAIAN KINERJA			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B 61,35	B 60,92	B 62,50	B 67,66	B 86,41	B 84,61	B 84,45	B 89,03
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	4 1,94	3 6,21	2 8,5	3 13,64	120 38,80	140 124,2	160 170	140 272,8
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	1. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46	54,41	69,50	67,06	112,43	80,01	99,28	93,14
Rata-rata capaian kinerja							89,41	107,20	128,43	148,74

Secara grafik dapat dilihat pada gambar berikut :



3.3 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2019

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun misi Badan Kesbangpol Prov Sumbar yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah :

MISI I MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Misi I Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan salah satu misi yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"**. Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi

SASARAN STRATEGIS I



Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	BB (76)	B (67,66)	B 89,03%

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan revidi dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inspektorat Daerah melakukan revidi terhadap dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol dan mengevaluasi masing-masing dokumen dengan menilai aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran kinerja (25%), Pelaporan kinerja (15%), Evaluasi internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%).

Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

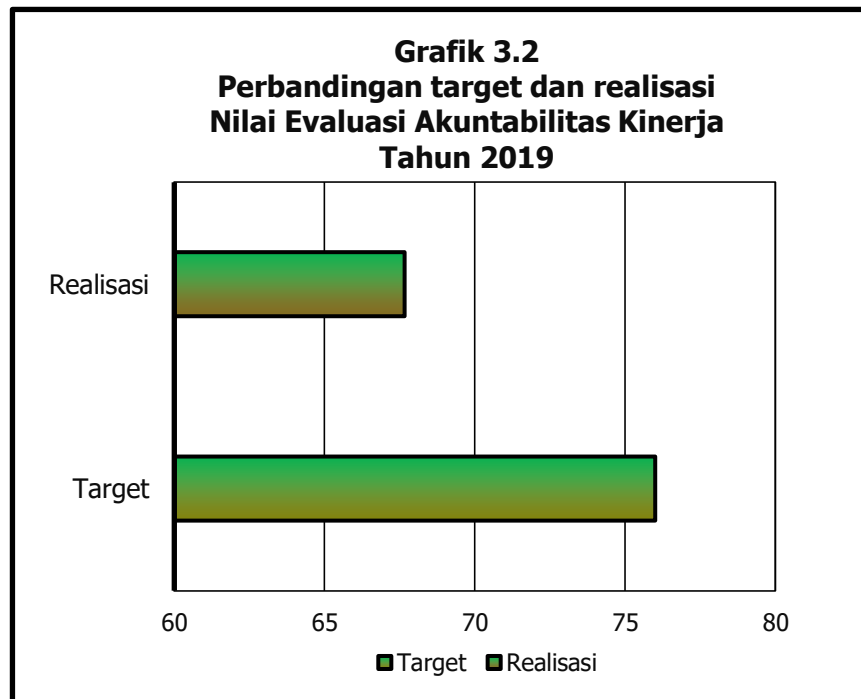
NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2018 yang dirilis oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2018 yang dirilis pada tahun 2019 ditargetkan BB (76). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar Tahun 2018 Nomor 700/63/Insp-SAU/2019 tanggal 3 Juli 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar memperoleh nilai sebesar 67,66 (enam puluh tujuh koma enam puluh enam) kategori B dengan interpretasi BAIK, Akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019, realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2019 yaitu 67,66 (B) belum mencapai target

yang ditetapkan yaitu 76 (BB). Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



Belum tercapainya nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja sebelumnya belum sepenuhnya dipakai untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan manajemen kinerja;
2. Belum adanya penghargaan yang diterima oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar pada tahun yang bersangkutan.
3. Belum adanya reward dan punishment terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
4. Hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja belum digunakan untuk pengambilan kebijakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Minimnya jumlah sumber daya manusia yang bisa menguasai teknologi informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran secara berkala dan berjenjang mulai dari staf sampai pimpinan tertinggi belum dapat dilakukan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 naik sebesar 5,16 poin jika dibandingkan realisasi tahun lalu, dimana nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 yang dirilis oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sebesar 62,50 sedangkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 yang dirilis pada tahun 2019 sebesar 67,66. Komponen penilaian yang mengalami kenaikan adalah pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi, sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah evaluasi internal. Adapun pelaporan kinerja bernilai sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada komponen evaluasi internal disebabkan karena beberapa hal diantaranya :

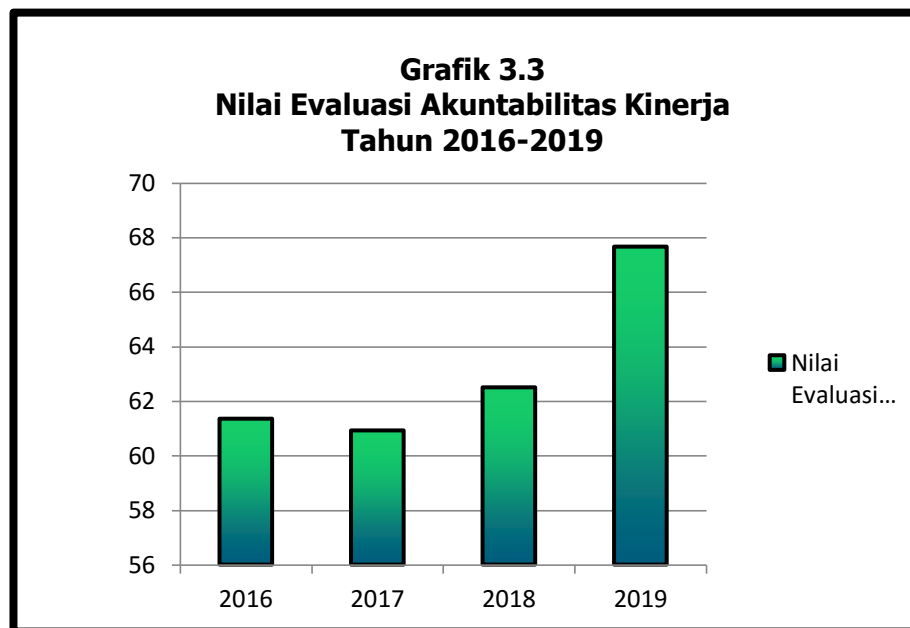
1. Evaluasi program yang menyajikan informasi tentang capaian hasil program telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya digunakan untuk menilai keberhasilan program, karena belum menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program, karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas
2. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan dan telah terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Jika dibandingkan realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol dari tahun 2017-2019 yaitu 60,92 tahun 2017, 62,50 tahun 2018 dan 67,66 tahun 2019. Penurunan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja terjadi pada tahun 2017 yaitu turun 0,43 poin dari tahun sebelumnya (tahun 2016). Perbandingan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Badan Kesbangpol Prov Sumbar
Tahun 2016-2019

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	20,11	18,82	21,82	25,40
2	Pengukuran Kinerja	16,81	15,83	14,10	15,83
3	Pelaporan Kinerja	10,03	9,28	10,78	10,78
4	Evaluasi Internal	6,15	6,11	6,38	6,19
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	8,25	10,88	9,42	9,46
Jumlah		61,35	60,92	62,50	67,66

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Dilihat dari sisi capaian indikator kinerja, capaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2019 sebesar 89,03% dan termasuk kategori keberhasilan "**Sangat Baik**". Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{67,66}{76} \times 100\% = 89,03\%$$

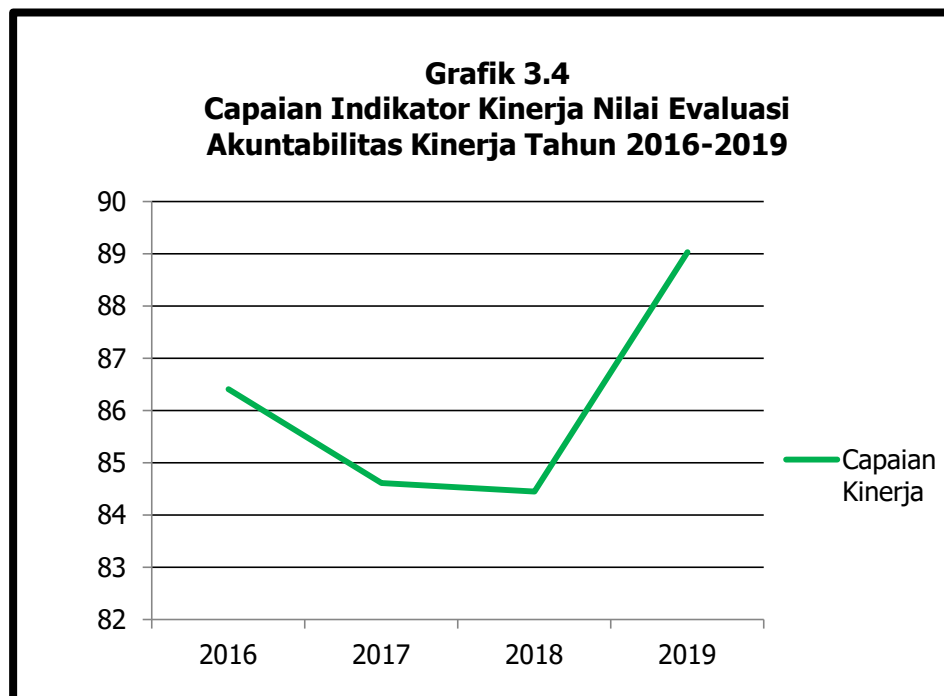
Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun lalu, capaian indikator kinerja tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dan jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, terjadi trend penurunan dari tahun 2016-2018, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian Indikator Kinerja			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	61,35	60,92	62,50	67,66	86,41	84,61	84,45	89,03

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan 4,58 poin dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 capaian indikator kinerja sebesar 89,03% sedangkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja sebesar 84,45%. Jika dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir, capaian indikator kinerja menunjukkan trend penurunan dari tahun 2016-2018, dan menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2018-2019.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar pada tahun 2016-2019 secara grafik disajikan pada gambar berikut :



Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021

Pada tahun keempat (tahun 2019) Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar, ditargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah B (80). Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 sebesar 84,58% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2019	
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	BB(76)	67,66	89,03	BB (80)	67,66	84,58

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

Dalam PermenPan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30). Nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan standar nasional (PermenPan dan RB Nomor 12 Tahun 2105) memperoleh nilai B (>60-70). Perbandingan nilai akuntabilitas dari Kemenpan-RB dengan kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2019

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Target BB (76) Realisasi 67,66 (B) Capaian 89,03%
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki 37system manajemen kinerja yang andal.	
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki 37system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	D	>0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2019 terjadi peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2019 dari tahun-tahun sebelumnya antara lain :

- a. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah dan dipublikasikan melalui website www.sumbarprov.go.id.
- b. Dokumen Renstra telah direvisi dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini, Renstra sudah menyajikan IKU yang selaras dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun.
- c. Badan Kesbangpol telah menyusun RKT, Perjanjian Kerja (Eselon II,III dan IV sampai dengan level staf) dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra.
- d. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan target keberhasilan serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilannya.
- e. Badan Kesbangpol telah membuat rencana aksi atas kinerja yang diperjanjikan dan telah mencantumkan target secara periodik/triwulan, dan dimonitor pencapaiannya secara berkala setiap triwulan.
- f. Pengukuran target kinerja Eselon III dan IV telah dilakukan dan hasil pencapaiannya sudah dilakukan monitoring secara berkala.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian kinerja untuk indikator ini belum mencapai target 100%. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk mencapai target kinerja 100% (BB) diantaranya :

1. Pemanfaatan rencana aksi untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan melakukan monitoring secara berkala dengan pendokumentasian yang lebih baik.
2. Pembuatan mekanisme dan implementasi pemberian reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.
3. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran hasil capaian kinerja menggunakan teknologi informasi, sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat.

4. Pemanfaatan pencapaian kinerja dan rencana aksi dalam evaluasi program untuk menilai keberhasilan program serta mencari alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sehingga hasil evaluasi program dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
5. Menerapkan inovasi dalam manajemen kinerja dengan indikator kinerja utama yang terukur sampai jenjang individu dan diukur secara berkala.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya tata kelola organisasi pada Badan Kesbangpol tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.522.256.160 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.484.734.843 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan hanya 98,51% yang terealisasi dan terdapat 1,49% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 1,49% untuk pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola organisasi. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya tata kelola organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	89,03%	98,51%	1,49%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian dari program ini adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran (100%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.208.116.854 dan terealisasi sebesar Rp. 1.195.740.433 (98,98%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya surat menyurat selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.955.700,- (99,68%).

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 123.519.778,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.585.769,00 (96,82%).

c. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor sebanyak 11 orang dan terealisasi sebanyak 11 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 407.430.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 400.994.868,- (98,42%).

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.926.800,- (99,82%).

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,-(100%).

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.941.208,-(99,41%).

g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 jenis yaitu spanduk, racun api, AC, vacuum cleaner dan papan pengumuman dan terealisasi sebanyak 5 jenis (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 38.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.397.950,- (97,87%).

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya surat kabar sebanyak 156 eksemplar dan terealisasi sebanyak 156 eksemplar (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 16.440.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.425.000,- (99,91%).

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 503.516.528,- dan terealisasi sebesar Rp. 502.519.138,- (99,80%).

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.994.000,- (99,97%).

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian dari program ini adalah meningkatnya pelayanan sarana dan pra sarana aparatur (100%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 354.415.000 dan terealisasi sebesar Rp. 345.855.061 (97,58%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat komunikasi sebanyak 3 jenis yaitu PABX, Handy Talky dan Radio Right dan

terrealisasi sebanyak 3 jenis (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.855.000,- (99,40%).

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang dipelihara sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- (100%).
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor dengan 3 paket pengerjaan dan terealisasi sebanyak 3 paket (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 73.165.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.907.000,- (96,91%).
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 7 unit yaitu 5 unit mobil dan 2 unit motor dan terealisasi sebanyak 7 unit (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.933.061,- (95,67%).
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 15 unit dan terealisasi sebanyak 15 unit (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 4.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.950.000,- (100%).
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya komputer/laptop/printer sebanyak 27 unit dan terealisasi sebanyak 27 unit (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 14.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.800.000,- (100%).
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Gedung kantor yang direhab sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.910.000,- (99,91%).

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian dari program ini adalah meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur (100%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 33.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.750.000 (100%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas sebanyak 45 stel dan terealisasi sebanyak 45 stel (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 33.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.750.000,- (100%).

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian dari program ini adalah meningkatnya wawasan dan kemampuan/kapasitas sumber daya aparatur (100%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 134.275.300 dan terealisasi sebesar Rp. 123.311.680 (91,83%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti Bimtek sebanyak 17 orang dan terealisasi 17 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 134.275.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.311.680,- (91,83%).

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian dari program ini adalah meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD (100%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 791.699.006 dan terealisasi sebesar Rp. 786.077.669 (99,29%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, DPPA SKPD dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya sebanyak 6 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 36.172.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.603.771,- (98,43%).

b. Penatausahaan Keuangan SKPD

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya honorarium Kuasa Pengguna Naggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran dan Pengelola keuangan SKPD lainnya sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 184.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.749.900,- (99,13%).

c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya LAKIP SKPD, LPPD SKPD, LKPj SKPD dan dokumen laporan lainnya sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak sebanyak 4 dokumen (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 173.965.006,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.889.558,- (99,96%).

d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya laporan hasil monev program dan kegiatan Kesbangpol sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 328.330.940,- (99,49%).

e. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengelola aset sebanyak 4 orang dan terealisasi sebanyak 4 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 67.212.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.503.500,- (97,46%).

MISI II MEWUJUDKAN STABILITAS MASYARAKAT YANG KONDUSIF UNTUK Mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat

Misi II Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat. Misi ini juga merupakan salah satu misi yang mendukung misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera	1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Barat

2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS II

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah jumlah konflik sosial di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah konflik sosial di Sumbar	kasus	<5	3	140%
2	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5%	13,64%	272,8%

2.1 Jumlah Konflik Sosial di Sumbar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam

situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Dalam rangka penanganan konflik sosial di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, telah melakukan berbagai upaya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah dan meredam potensi konflik yang ada di Sumatera Barat tahun 2019. Upaya yang dilakukan diantaranya melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi/lembaga terkait di daerah yang rawan konflik. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial seperti yang telah disebutkan di atas, maka ditetapkan jumlah konflik Sosial di Sumbar sebagai salah satu indikator untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam laporan kinerja ini, terdapat 4 jenis konflik sosial yang diukur jumlahnya dari tahun ke tahun yaitu konflik SARA, perbatasan, tanah ulayat dan konflik Sumber Daya Alam.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

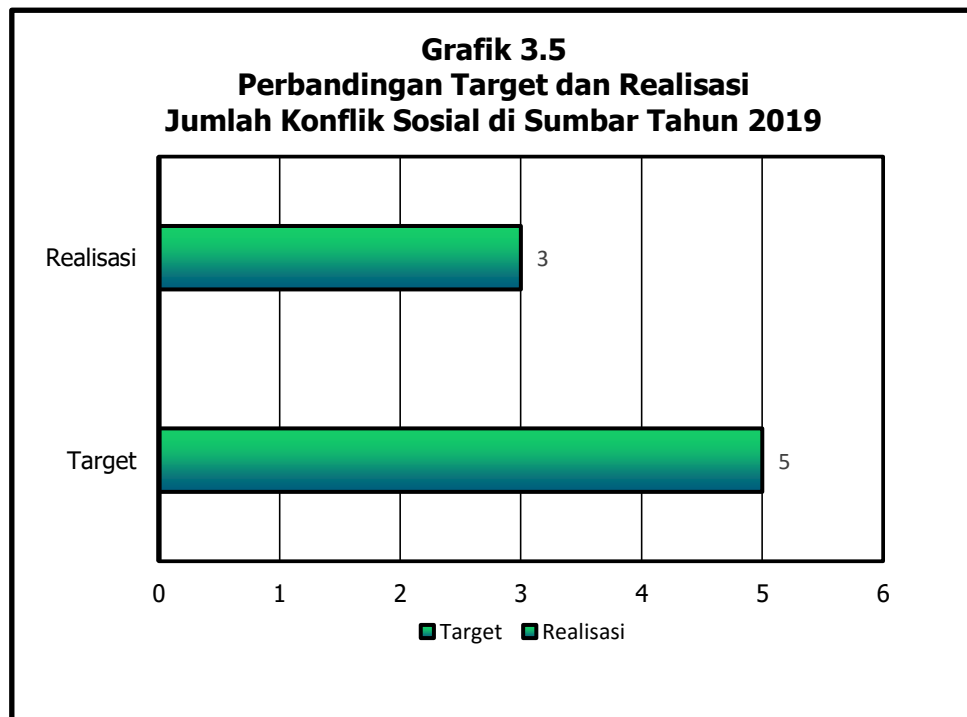
Pada tahun 2019, terjadi 3 konflik sosial di Sumbar yang dikategorikan konflik Sumber Daya Alam, Konflik Lahan dan Konflik Perbatasan. Sumber data diperoleh dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Adapun rangkuman dari konflik yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2019 yaitu :

- 1) Aksi perusakan kendaraan dinas oleh masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar pada kegiatan operasi penerbitan alat tangkap bagan dan keramba jaring apung (KJA) di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 November 2019.
- 2) Perusakan tapal batas Nagari Kepencong Lubuk Gambir (Kapelgam) dengan Koto Baru oleh masyarakat Nagari Kapelgam terkait peristiwa kepemilikan lahan. Peristiwa ini terjadi di Nagari Keponcolng Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 26 November 2019.
- 3) Bentrok antar warga Nagari Sumpur dengan warga Bungo Tanjung terkait persoalan tapal batas nagari dipicu oleh pemancangan tanah di daerah tapal batas oleh warga Bungo Tanjung yang diprotes oleh warga negara Sumpur, mengakibatkan 3 orang terluka akibat senjata tajam dan dilarikan ke RSUD Padang Panjang, 1 dirujuk ke RSUD

M.Djamil Padang. Peristiwa ini terjadi di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 5 Desember 2019.

Jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2019, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019 ditargetnya jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumatera Barat kurang dari 5 kasus, sedangkan realisasinya sebanyak 3 kasus. Dengan kata lain, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat sepanjang tahun 2019 sehingga konflik yang terjadi tidak melebihi target yang ditetapkan (kurang dari 5 kasus). Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jumlah konflik sosial di Sumatera Barat pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 jumlah konflik sosial di Sumbar sebanyak 2 kasus. Namun, jenis dan lokasi terjadinya konflik pada tahun 2019 berbeda dengan jenis dan lokasi konflik yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, konflik yang terjadi di Sumatera Barat keduanya merupakan konflik sumber daya alam.

Sedangkan pada tahun 2019, konflik yang terjadi di Sumatera Barat merupakan konflik tapal batas/perbatasan dan konflik sumber daya alam.

Konflik yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Di Kabupaten Pasaman, terjadi konflik antar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pasaman dengan masyarakat Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik ini dipicu adanya kegiatan tambang emas oleh PT Inexo Jaya Mandiri (IJM). Sedangkan di Kabupaten Solok, terjadi konflik antara masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang dengan pemerintah kabupaten Solok, kepolisian resor (Polres) Arosuka, serta PT HDE. Konflik ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Sejak awal, masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang telah melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal tersebut. Kedua konflik yang terjadi pada tahun 2018 tersebut sudah dapat diselesaikan dan dimediasi oleh pihak-pihak terkait sehingga pada tahun ini tidak terjadi lagi aksi anarkisme yang berujung pada pengrusakan atau kerugian bagi masyarakat sekitar.

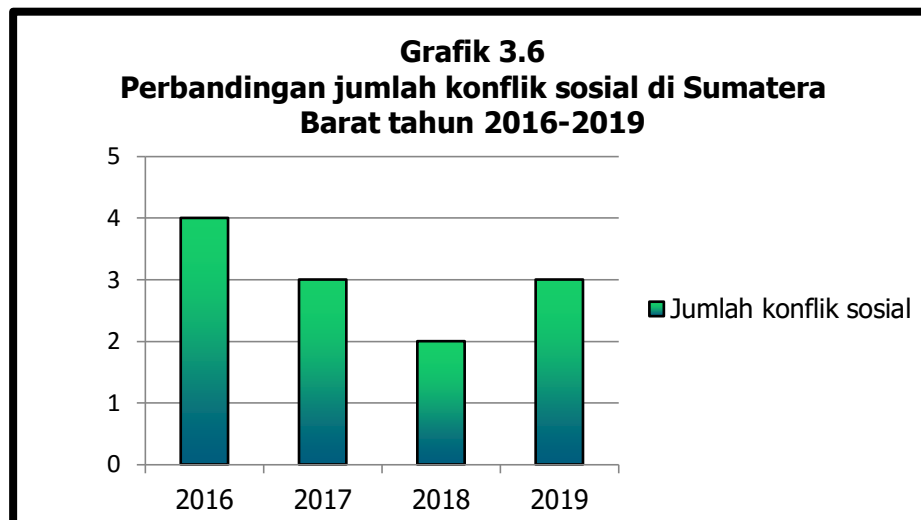
Jika dibandingkan realisasi jumlah konflik sosial tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah konflik sosial di Sumbar dari tahun 2016-2018 yaitu 4 kasus di tahun 2016, 3 kasus di tahun 2017 dan 2 kasus di tahun 2018. Jumlah konflik sosial di Sumbar meningkat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1 kasus dari tahun sebelumnya (tahun 2018). Perbandingan jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Jumlah Konflik Sosial di Sumatera Barat
Tahun 2016-2019

No	Konflik Sosial	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Konflik Lahan/Tanah Ulayat	1 kasus	2 kasus	-	
2	Konflik Perbatasan	2 kasus	-	-	2 kasus
3	Konflik SARA		-	-	
4	Konflik Sumber Daya Alam	1 kasus	1 kasus	2 kasus	1 kasus
Total		4 kasus	3 kasus	2 kasus	3 kasus

Sumber : Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Secara grafik, perbandingan jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa konflik sosial di Sumatera Barat mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dan mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi 4 konflik sosial yaitu konflik lahan/tanah ulayat sebanyak 1 kasus, konflik perbatasan sebanyak 2 kasus, dan konflik sumber daya alam sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2017 terjadi 3 konflik sosial yaitu konflik lahan/tanah ulayat sebanyak 2 kasus dan konflik Sumber Daya Alam sebanyak 1 kasus. Konflik sosial yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus yang keduanya merupakan konflik sumber daya alam. Sedangkan konflik sosial yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 3 kasus yaitu konflik perbatasan sebanyak 2 kasus dan konflik Sumber Daya Alam sebanyak 1 kasus.

Dilihat dari sisi capaian indikator kinerja, capaian indikator kinerja jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2019 sebesar 140 % dan termasuk kategori keberhasilan "**Sangat Baik**". Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times 5) - 3}{5} \times 100\% = 140\%$$

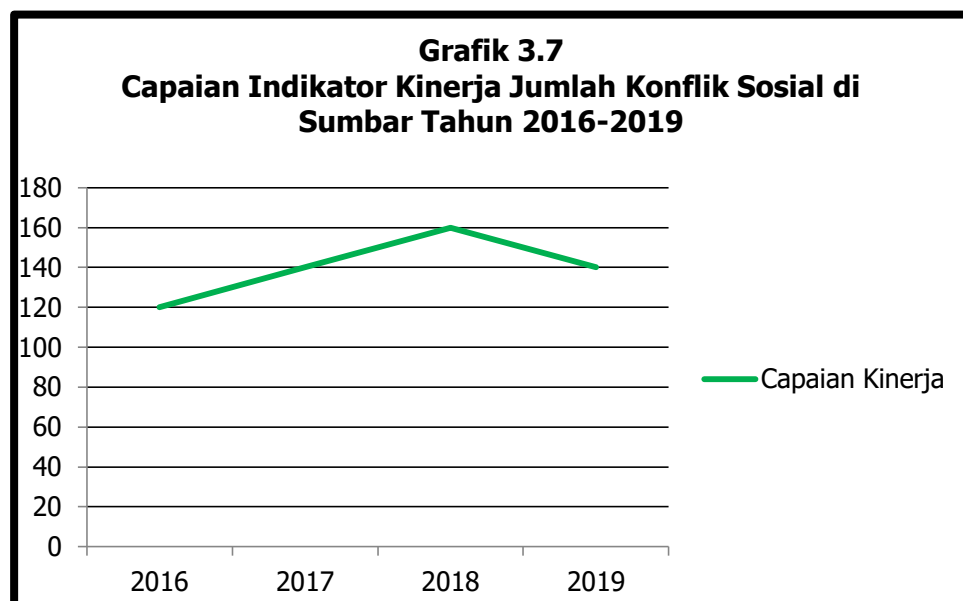
Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun lalu, capaian indikator kinerja jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 140% di tahun 2019 dan 160% di tahun 2018. Dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, terjadi trend peningkatan capaian kinerja dari tahun 2016-2018, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian Indikator Kinerja			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah konflik sosial di Sumbar	4	3	2	3	120%	140%	160%	140%

Perbandingan capaian indikator kinerja jumlah konflik sosial di Sumbar pada tahun 2016-2019 secara grafik disajikan pada gambar berikut :



Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021 ditargetkan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar kurang dari 5 kasus setiap tahunnya (<5). Jika diakumulasikan pada tahun keempat (tahun 2019) Renstra Badan Kesbangpol Prov

Sumbar, ditargetkan jumlah konflik sosial di Sumbar kurang dari 20 kasus (<20). Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 sebesar 140% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi s.d 2019	%
Jumlah konflik sosial di Sumbar	Nilai	<5	3	140	<20	12	140

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Badan Kesbangpol Prov Sumbar dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan tahun 2019 yaitu jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar kurang dari 5 kasus sepanjang tahun 2019. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya koordinasi, komunikasi antar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sumatera Barat salah satunya melalui kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk mengaktifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pascakonflik.
2. Adanya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme dan Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan preventif yang membangun pengetahuan, pemikiran serta kepedulian masyarakat, generasi muda dan seluruh elemen masyarakat terhadap pencegahan dan penganggulangan bahaya terorisme.

3. Diikutinya diklat intelijen bagi aparaturnya Kesbangpol yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan BAIS (Badan Intelijen Strategis), guna meminimalisir bahaya radikalisme dan cara penanganan Konflik yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
4. Dibentuknya tim dan forum-forum strategis oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
5. Terjalinnnya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dan tim Kominda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
6. Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.
7. Tersedianya buku pemetaan potensi konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang. Adapun hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik tahun 2019, terdapat 129 potensi konflik yang terdata di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
 2. Adapun klasifikasi potensi konflik berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :
 - a) Potensi konflik yang berlatar belakang SDA/Lahan sebanyak 51 potensi
 - b) Potensi konflik berlatar belakang ekopolsosbud sebanyak 38 potensi.
 - c) Potensi konflik berlatar belakang SARA sebanyak 9 potensi.
 - d) Potensi konflik berlatar belakang batas wilayah sebanyak 31 potensi

3. Dari 129 potensi konflik tersebut, terdapat sebanyak 15 potensi konflik menonjol yang masih dalam pemantauan pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait.
4. Dari 129 potensi konflik yang ada, terdapat 3 peristiwa konflik (anarkis).
8. Dilaksanakannya penguatan dan pembekalan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan generasi muda yang mencakup ketahanan bangsa, nilai nilai luhur bangsa, pemahaman bela negara, pembauran kebangsaan dan penguatan karakter bangsa melalui revolusi mental sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat yang bisa berujung pada konflik SARA.

Dalam pencapaian kinerja ini terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi antaranya :

1. Terbatasnya jumlah intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Masih rendahnya kapasitas dan kemampuan intelijen yang ada saat ini sehingga informasi dan data yang diperoleh belum optimal
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar anggota Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Sumatera Barat, tokoh-tokoh masyarakat/agama/adat dan instansi terkait lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial
4. Minimnya dukungan anggaran dalam pembentukan tim penyusunan pemetaan dan evaluasi pemetaan konflik di Sumatera Barat.
5. Lemahnya sistem pelaporan dari kabupaten dan kota ke provinsi tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
6. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
7. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda di Sumatera Barat yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya :

1. Penambahan jumlah tenaga intelijen pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang ada dengan memberikan pendidikan intelijen untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan intelijen dalam melakukan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai gejala yang muncul di tengah masyarakat khususnya masalah konflik sosial.
3. Mengintensifkan pertemuan dan koordinasi dengan Kominda dan instansi terkait dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan mencari solusi dan pemecahan permasalahan yang lebih optimal.
4. Pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna meningkatkan peran dan fungsi koordinasi lintas instansi dalam menyusun pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat.
5. Melaksanakan rakor (rapat koordinasi) terpadu penanganan konflik sosial bagi kabupaten/kota se-Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial di tingkat Kabupaten/Kota.
6. Melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis yang ada di daerah
7. Mengadakan sosialisasi/pelatihan/pembekalan bagi masyarakat diantaranya generasi muda, pelajar, etnis/paguyuban, wali nagari, bamus, pengurus KAN, Bundo Kanduang tentang ideologi dan wawasan kebangsaan yang saat ini mulai memudar. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya gesekan-gesekan di masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik SARA.

2. 2 Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar

Kriminalitas merupakan suatu pola mengenai tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat (atau bisa disebut korban) berupa reaksi formal, informal, dan nonformal. *Pengertian kriminalitas* secara umum juga sebagai tindakan dimana dalam perbuatannya yaitu melanggar hukum dan aturan serta norma norma sosial di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga dampak kriminalitas sendiri bisa jadi berupa penentangan dari masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Upaya yang

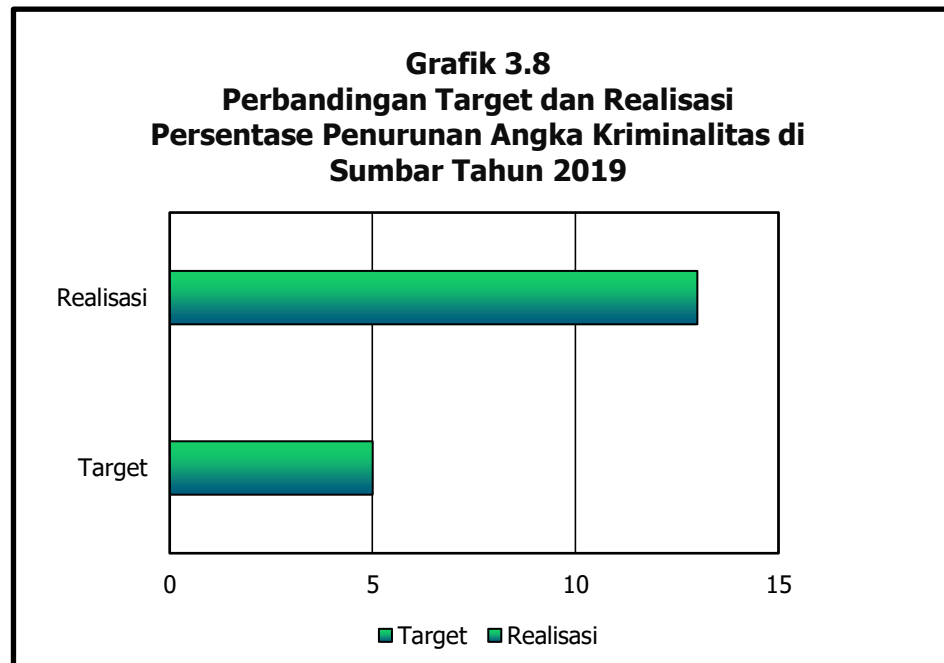
dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut bersifat konsep dan preventif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait aturan dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam penerapan di lapangan dalam hal pemberian sanksi terkait peristiwa yang terjadi dalam bentuk perkelahian atau perbuatan yang merugikan orang lain merupakan tugas dari kepolisian.

Keamanan dan ketertiban masyarakat akan terwujud jika angka kriminalitas di daerah tersebut rendah. Oleh sebab itu, penurunan angka kriminalitas termasuk salah satu tanggung jawab dari Badan Kesbangpol selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar merupakan indikator kedua untuk pencapaian sasaran kedua Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2019 diukur dari perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun 2018 yang direlease pada tahun 2019 dengan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun sebelumnya. Kasus-kasus kejahatan di Sumbar yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan angka kriminalitas tersebut diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembakaran/kebakaran, perkosaan, pembunuhan, penipuan, perusakan, kejahatan terkait narkoba dan psikotropika dan kasus penganiayaan. Sumber data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2019, ditargetkan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5% dan realisasinya menunjukkan penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 13,64%. Dilihat dari jumlah kasusnya, terjadi penurunan kasus angka kriminalitas di Sumbar sebanyak 1.459 kasus dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 (dirilis pada tahun 2019), jumlah kasus kriminalitas di Sumbar sebanyak 9.236 kasus sedangkan pada tahun 2017 (dirilis tahun 2018) jumlah kasus kriminalitas di Sumbar sebanyak 10.695 kasus. Penurunan angka kriminalitas tersebut menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan berbagai upaya dan tindakan preventif untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus kriminalitas di Sumbar.



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

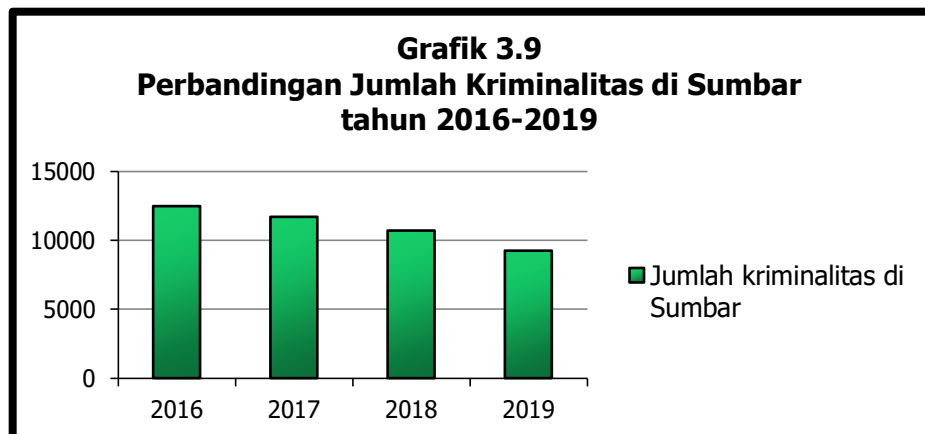
Angka kriminalitas di Sumatera Barat tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2016-2019, dimana pada tahun 2016 angka kriminalitas di Sumbar sebanyak 12.464 kasus, tahun 2017 sebanyak 11.689 kasus, tahun 2018 sebanyak 10.695 kasus dan tahun 2019 sebanyak 9.236 kasus. Perbandingan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan angka kriminalitas di Sumatera Barat
Tahun 2016-2019

No	Kasus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Curat	3120	2925	3034	2.471
2	Curas	495	509	512	387
3	Curanmor	2975	3143	2975	2.379
4	Pembakaran/Kebakaran	146	148	23	0
5	Perkosaan	59	57	54	31
6	Pembunuhan	18	20	14	14
7	Penipuan	1324	1158	967	974
8	Perusakan	668	600	451	21
9	Kejahatan terkait narkoba dan psikotropika	635	824	592	806
10	Penganiayaan	3024	2305	2073	2153
Total		12.464	11.689	10.695	9.236

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Secara grafik, perbandingan jumlah kriminalitas di Sumbar tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

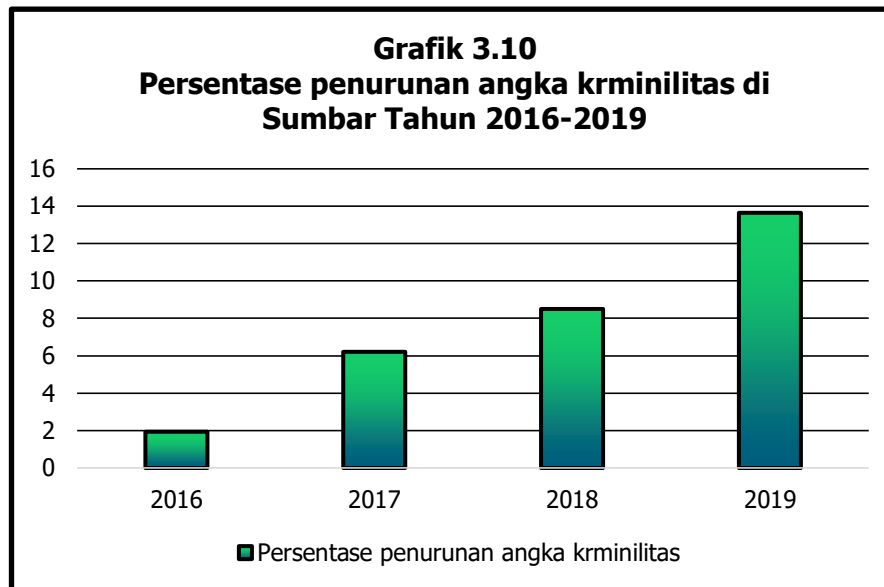


Untuk realisasi indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumatera Barat tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penurunan angka kriminalitas di Sumatera Barat pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 8,5% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13,64%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi persentase penurunan angka kriminalitas dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 1,94% tahun 2016, 6,21% tahun 2017, 8,5% tahun 2018 dan 13,64% tahun 2019. Perbandingan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan realisasi persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	1,94%	6,21%	8,5%	13,64%

Secara grafik, persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar dapat dilihat pada gambar berikut :



Dilihat dari sisi capaian indikator kinerja, capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2019 sebesar 272,8 % dan termasuk kategori keberhasilan **"Sangat Baik"**. Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

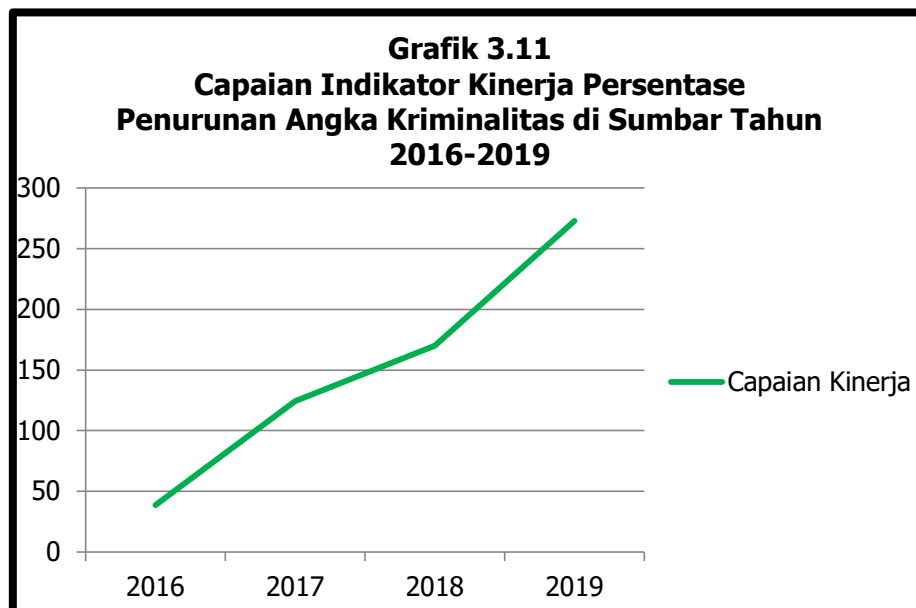
$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{13,64}{5} \times 100\% = 272,8\%$$

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun lalu, capaian indikator kinerja persentase penurunan konflik sosial di Sumbar tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 272,8% di tahun 2019 dan 170% di tahun 2018. Dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, terjadi trend peningkatan capaian kinerja dari tahun 2016-2019, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar
Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	1,94	6,21	8,5	13,64	38,8	124,2	170	272,8

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi *trend* peningkatan capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar dari tahun 2016-2019 yaitu sebesar 38,8% di tahun 2016, 124,2% di tahun 2017, 170% di tahun 2018 dan 272,8% di tahun 2019. Perbandingan capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar pada tahun 2016-2019 secara grafik disajikan pada gambar berikut :



Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021 ditargetkan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5% setiap tahunnya. Jika diakumulasikan pada tahun keempat (tahun 2019) Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar, ditargetkan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 30%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 sebesar 45,46% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi s.d 2019	%
Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5	13,64	272,8	30	13,64	45,46

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Peningkatan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar dari tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya sosialisasi dan pembekalan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda yang di beberapa daerah di Sumbar sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat serta pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar. Hal ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Disusunnya Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yaitu Perda No 9 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 sabagai tindak lanjut Permendagri No 21 tahun 2013. Perda ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan Napza di Sumbar dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah baik dalam bentuk antisipasi dini, pencegahan, fasilitasi rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan serta partisipasi masyarakat.
3. Adanya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

Dalam meningkatkan capaian kinerja indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar, terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Minimnya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya perbuatan maksiat dan penyalahgunaan narkoba.
2. Kurangnya pengawasan orang tua, mamak, guru, mubaligh, ulama dan para ulama terhadap tingkah laku anak yang ada di sekitar mereka.
3. Regulasi yang ada saat ini terkait dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melakukan tindak kriminalitas belum menimbulkan efek jera.
4. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dari luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal khususnya bagi generasi muda.

Untuk menghadapi hambatan di atas, ada beberapa solusi atau upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas diantaranya ;

1. Meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam rangka pemberantasan perbuatan maksiat dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan 6 kali sosialisasi bagi masyarakat khususnya generasi muda terkait pemberantasan perbuatan maksiat dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
2. Penyusunan Pergub Nomor 37 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Meningkatkan intensitas pertemuan dan rapat-rapat koordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, TNI dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pencegahan terkait dengan penyebaran kasus maksiat, narkoba dan kasus kriminalitas lainnya.
4. Koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol Provinsi dengan tokoh-tokoh masyarakat, (alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan maksiat

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada Badan Kesbangpol tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.325.116.622 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.263.745.620 (Tiga Milyar

Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah). Dengan kata lain, capaian kinerja keuangan sebesar 98,15% yang terealisasi dan terdapat 1,85% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 1,85% untuk pencapaian sasaran meningkatnya kemaanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban terbagi atas 2 indikator yaitu jumlah konflik sosial di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar. Untuk indikator jumlah konflik sosial di Sumbar dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.840.904.799 (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.790.045.134 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan 98,21% yang terealisasi dan terdapat 1,79% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 1,79% untuk indikator jumlah konflik sosial di Sumbar. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 1,79% untuk pencapaian indikator jumlah konflik sosial di Sumbar. Adapun untuk indikator persentase penurunan angka kriminalitas dialokasikan anggaran sebesar Rp.484.211.823 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.473.700.486 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan 97,93% yang terealisasi dan terdapat 2,17% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 2,17% untuk indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya tata kelola organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasarn Meningkatnya
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya keamanan, ketenraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah Konflik Sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	140% 272,8%	98,21% 97,93%	1,79% 2,17%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator jumlah konflik sosial di Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Capaian dari program ini adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan (80%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.294.461.200 dan terealisasi sebesar Rp.1.268.136.062 (97,97%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat koordinasi sebanyak 1 kali/60 orang, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi Rapat koordinasi sebanyak 1 kali/60 orang dan Monev 19 kab/kota (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 70.708.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.303.400,- (96,60%).

b. Penanganan Masalah Strategis Daerah

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat dengan Tim Kominda dan Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah sebanyak 2 kali, Monev 19 kab/kota, laporan sebanyak 1 laporan, dan terealisasi Rapat tidak terlaksana (0%) dan Monev 19 kab/kota (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 127.848.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.940.700,- (97,73%).

c. Pengawasan Orang Asing

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat Tim Pengawasan Orang Asing sebanyak 3 kali, Monev 19 kab/kota, laporan Ranpergub sebanyak 1 laporan, dan terealisasi Rapat Tim Pengawasan Orang Asing sebanyak 3 kali, Monev 19 kab/kota dan laporan Ranpergub sebanyak 1 laporan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 263.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.442.043,- (96,02%).

d. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial (PKS) sebanyak 5 kali, Rapat Koordinasi sebanyak 1 kali, Monev 19 kab/kota, laporan Rencana Aksi sebanyak 3 laporan, dan terealisasi Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial (PKS) sebanyak 5 kali, Rapat Koordinasi sebanyak 1 kali, Monev 19 kab/kota, laporan Rencana Aksi sebanyak 3 laporan (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 249.236.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.349.602,- (98,84%).

- e. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Monev 19 kab/kota, dan terealisasi Monev 19 kab/kota (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.376.475,- (98,75%).
- f. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Monitoring 19 kab/kota dan laporan sebanyak 1 buku pemetaan potensi konflik sosial, dan terealisasi Monitoring 19 kab/kota dan laporan sebanyak 1 buku pemetaan potensi konflik sosial (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 249.236.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.308.070,- (98,76%).
- g. Forkomkon Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat Koodinasi Jajaran Aparatur Kesbangpol Provinsi dengan kab/kota di Sumbar sebanyak 1 kali/60 orang dan terealisasi sebanyak 1 kali/60 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 68.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.979.400,- (98,50%).
- h. Forum Diskusi Pimpinan Daerah
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat dengan Forkopimda sebanyak 1 kali, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi Rapat dengan Forkopimda sebanyak 1 kali, Monev 19 kab/kota (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 258.229.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 256.514.772,- (99,34%).
- i. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat FKDM sebanyak 4 kali, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi Rapat FKDM sebanyak 4 kali dan Monev 19 kab/kota (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 79.376.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.086.250,- (95,86%).
- j. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol se Sumbar sebanyak 1 kali/60 orang, dan terealisasi sebanyak 1 kali/60 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 64.995.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.835.350,- (99,75%).

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Capaian dari program ini adalah meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (80%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.1.546.443.599 dan terealisasi sebesar Rp.1.521.072. (98,41%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi sebanyak 1 kali/70 orang, dan terealisasi sebanyak 1 kali/70 orang (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 64.172.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.608.400,- (96,01%).

b. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi 1 kali/60 orang, Rapat kerja 1 kali, Peringatan PKN Revolusi Mental 1 kali, dan terealisasi (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 159.061.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 158.165.700,- (99,44%).

c. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi tentang penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat 1 kali/50 orang, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.499.800,- (97,50%).

d. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan 1 kali/50 orang, Rapat Tim Forum Pembauran Kebangsaan 2 kali dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 67.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.143.175,- (94,75%).

e. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah peserta yang mengikuti forum pemantapan wawasan kebangsaan 10 kali/1425 orang, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 918.242.087,- dan terealisasi sebesar Rp. 910.262.235,- (99,13%).

f. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat 2 kali, monev 19 kab/kota, laporan permasalahan idiologi wasbang 1 laporan, terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 2 kab/kota, PPWK 1 kab/kota, dan terealisasi

100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 69.444.612,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.695.150,- (97,48%).

g. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rakor FKUB 1 kali, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.771.309,- (92,53%).

h. Penguatan Wawasan Bela Negara

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi 1 kali/60 orang, Rapat Tim Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara 2 kali, Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara 1 kali, Peringatan Hari Bela Negara 1 kali, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 137.823.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.763.303,- (99,23%).

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Capaian dari program ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat (80%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.173.503.823 dan terealisasi sebesar Rp.168.255.240. (96,97%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi P4GN 1 kali/60 orang, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 60.083.823,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.829.297,- (92,92%).

b. Sosialisasi Perda Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA 1 kali/75 orang, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.056.743,- (98,82%).

c. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Upacara HANI 1 kali, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 33.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. . 33.369.200,- (99,85%).

2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Capaian dari program ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat (80%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.310.708.000 dan terealisasi sebesar Rp.305.445.246. (98,31%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi 4 kali/360 orang, Monev 19 Kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 310.708.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 305.445.246,- (98,31%).

SASARAN STRATEGIS III



Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama *stakeholder* lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan

Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang ikut berperan penting dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar khususnya terhadap perkembangan aspek hak-hak politik (*political right*). Oleh sebab itu, ditetapkan indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur atau indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

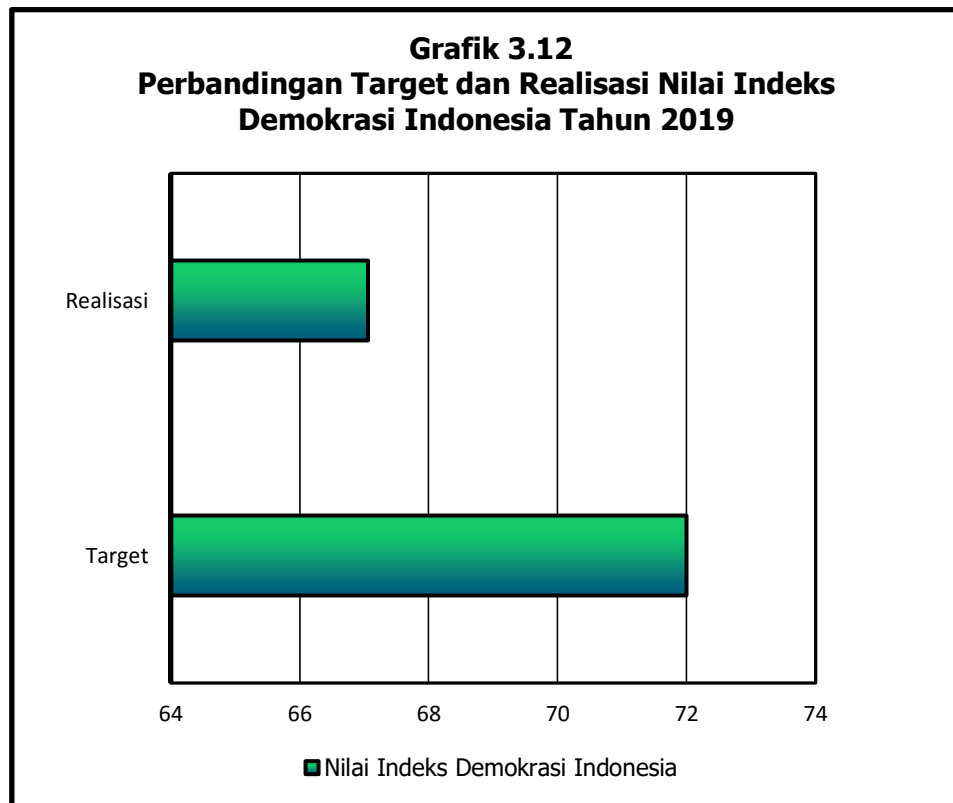
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	nilai	72	67,06	93,14%

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 adalah 67,06. Jika dibandingkan antara target dengan

realisasi indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2019, realisasinya belum 100% mencapai target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019 ditargetnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat sebesar 72, sedangkan realisasinya 67,06. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar turun 2,44 poin dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar 69,50. Dengan penurunan ini maka tingkat demokrasi di Sumatera Barat pada tahun terakhir masih tetap berada pada kategori "sedang.". Penyebab utama penurunan Indeks Demokrasi Indonesia antara lain Perda inisiatif DPRD terhadap total Perda menurun, kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat dan jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN. Perbandingan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun ini dengan tahun sebelumnya

ditinjau dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator penilaian IDI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK/VARIABEL /INDIKATOR		2017	2018
	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA	69,50	67,06
A	KEBEBASAN SIPIL	61,66	55,32
I	Kebebasan berkumpul dan berserikat	100	50
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100
II	Kebebasan berpendapat	83,33	100
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	87,50	100
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	62,50	100
III	Kebebasan berkeyakinan	38,43	39,08
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	13,04	21,74
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100	75
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100	85
IV	Kebebasan dari diskriminasi	96,53	77,28
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100	100
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	87,50
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100	41,67
B	HAK-HAK POLITIK	61,08	62,84
V	Hak memilih dan dipilih	74,12	74,12
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	100	100
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60	60
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	76,31	76,31
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turn out)	68,43	68,43

15	Perempuan terpilih di DPRD Provinsi	35,90	35,90
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	48,03	51,56
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	45,65	43,48
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	50,41	59,63
C	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI	92,72	88,52
VII	Pemilu yang bebas dan adil	100	100
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100	100
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100	100
VIII	Peran DPRD	71,36	68,05
20	Skor alokasi anggaran pendidikan	100	100
	Skor alokasi anggaran kesehatan	30,77	9,52
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	3,57	3,57
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	7,14	3,57
IX	Peran Partai Politik	100	100
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100	100
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100	100
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	92,78	77,15
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	84,21	50
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	100	100
XI	Peran Peradilan Yang Independen	100	100
27	Keputusan hakim yang controversial	100	100
28	Penghentian penyidikan yang controversial oleh jaksa atau polisi	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka IDI 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni **aspek kebebasan sipil** dengan rata-rata Sumatera Barat 55,32; **aspek hak-hak politik** sebesar 62,84 dan **aspek lembaga demokrasi** sebesar 88,52. Secara lebih rinci, di tahun 2018 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, mengalami penurunan sebesar 6,34 poin, aspek hak-hak politik mengalami kenaikan 1,76 poin dan aspek lembaga demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 4,20 poin. Hal-hal ini menggambarkan tingkat dinamika demokrasi di Sumatera Barat.

Dilihat dari segi variabel IDI, pada tahun 2018 terdapat **tiga variabel IDI di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan, empat variabel mengalami penurunan dan empat variabel tidak mengalami perubahan**. Dari tiga variabel yang mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada **variabel Kebebasan berpendapat** yang naik sebesar 16,68 poin; diikuti oleh **variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan** sebesar 3,52 poin. Empat variabel

yang mengalami penurunan adalah **variabel kebebasan berkumpul dan berserikat** dimana terjadi penurunan sebesar 43,75 poin, **variabel kebebasan dan diskriminasi** turun sebesar 19,25 poin, **variabel peran birokrasi pemerintahan daerah** turun sebesar 15,63 poin. Poin terendah terjadi pada **variabel peran DPRD** yaitu sebesar 3,31. Sedangkan empat variabel (Hak memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, dan Peran Peradilan yang Independen) tidak mengalami perubahan atau tetap.

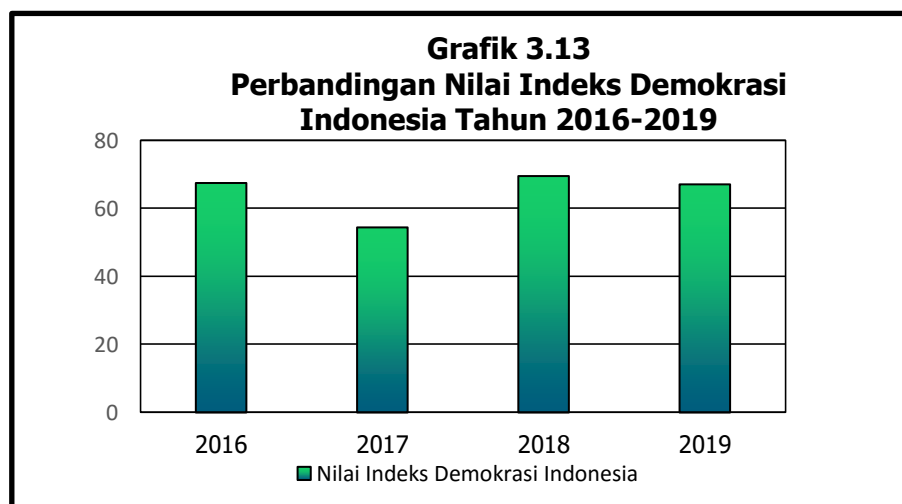
Selanjutnya, dari sisi indikator, pada IDI 2018 terdapat 18 indikator yang bernilai baik" (indikator dengan skor di atas 80). Namun, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori "buruk" (indikator di bawah skor 60). Berbagai indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2019, nilainya cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu sebesar 67,46 tahun 2016, 54,41 tahun 2017, 69,50 tahun 2018 dan 67,06 tahun 2019. Perbandingan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar
Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46	54,41	69,50	67,06

Secara grafik, perbandingan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut :



Dilihat dari sisi capaian indikator kinerja, capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2019 sebesar 93,14% dan termasuk kategori keberhasilan "**Sangat Baik**". Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{67,06}{72} \times 100\% = 93,14\%$$

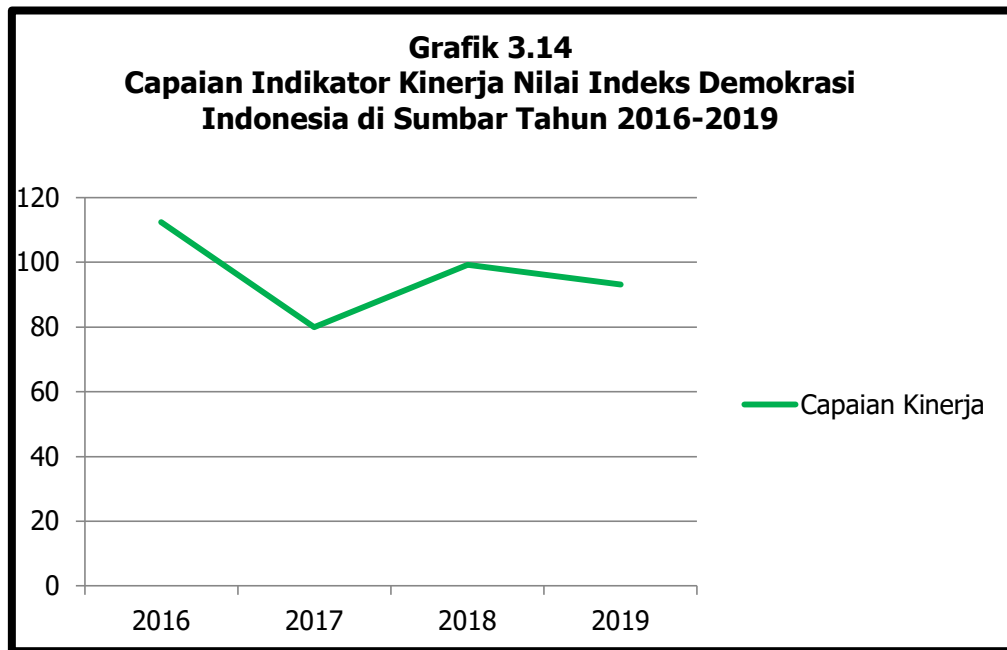
Capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2019 menurun 6,14% jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana di tahun 2019 capaian indikator nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar 93,14% dan 99,28% di tahun 2018. Dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia berfluktuasi dari tahun 2016-2019, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Realisasi dan Capaian Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar
Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Nila Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46	54,41	69,50	67,06	112,43	80,01	99,28	93,14

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar dari tahun 2016-2019 yaitu sebesar 112,43% di tahun 2016, 80,01% di tahun 2017, 99,28% di tahun 2018 dan 93,14% di tahun 2019.

Secara grafik, capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2016-2019 disajikan pada gambar berikut :



Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021 ditargetkan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar pada tahun 2021 sebesar 76. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 sebesar 88,23% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2019	
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar	Nilai	72	67,06	93,14	76	67,06	88,23

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) IDI di Sumatera Barat
2. Minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan sosialisasi untuk peningkatan nilai IDI di Sumbar sedangkan pemahaman masyarakat tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar masih rendah
3. Pendidikan politik belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat karena keterbatasan alokasi anggaran.
4. Masih terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.

Adapun solusi atau alternatif yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar antara lain ;

1. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pemilu. Tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut diantaranya :
 - a. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS
 - b. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - c. Pencalonan
 - d. Kampanye
 - e. Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - f. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara
2. Melakukan penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui rapat tim Pokja IDI dengan melibatkan pihak-pihak terkait
3. Melakukan pendidikan politik sebanyak 6 kali bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan perempuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dalam rangka menaikkan indikator pada aspek hak-hak politik
4. Melakukan sosialisasi bagi aparatur tentang hasil Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

Secara nasional, nilai Indeks Demokrasi Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu "baik" (Indeks >80), "sedang (Indeks 60-80), dan "buruk" (Indeks <60). Pada tahun 2018, nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 adalah 72,39. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 yaitu sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori "sedang".

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar pada tahun 2019 yakni sebesar 67,06 (kateegori sedang), nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar lebih rendah 5,03 poin dibandingkan dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 (72,39).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat pada Badan Kesbangpol tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.811.612.700 (Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.762.482.972 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan hanya 93,95% yang terealisasi dan terdapat 6,05% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 6,05% untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat. Efisiensi penggunaan sumber daya untu mendukung sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi Di Sumatera Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	93,14%	93,95%	6,05%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

I. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Capaian dari program ini adalah terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah (80%). Dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 811.612.700 dan terealisasi sebesar Rp. 762.482.972 (93,95%). Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat Kerja Pokja IDI 1 kali, Sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia 1 kali/75 orang, Monev, 19 kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 72.916.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.299.200,- (97,78%).

b. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi 1 kali/60 orang, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 63074.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.783.895,- (96,37%).

c. Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat 2 kali/150 orang, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.028.182,- (95,02%).

d. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapat 8 kali, Monev 19 kab/kota, Rakor Pilkada 1 kali, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 298.596.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 279.542.378,- (93,62%).

e. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten/kota di Sumbar

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Verifikasi berkas PAW anggota DPRD kab/kota 3 kali, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi Verifikasi berkas PAW anggota DPRD kab/kota 3 kali (67%), Monev 19 kab/kota (100%). Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.905.200,- (78,45%).

f. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik 20 kali, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi 100%.

Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 121.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.155.200,- (95,17%).

- g. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Bimtek bantuan keuangan partai politik 1 kali/60 orang, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 56.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.897.900,- (90,37%).
- h. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
Output yang akan dicapai pelaksanaan kegiatan ini adalah Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan 1 kali/60 orang, Monev 19 kab/kota, dan terealisasi 100%. Adapun dana yang tersedia sebesar Rp. 60.704.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.871.017,- (92,04%).

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2019, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 11.973.938.770** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 5.314.953.288** dan belanja langsung sebesar **Rp. 6.658.985.482**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2019 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.926.868.120 (92,70%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 6.510.963.435 (97,78%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2019 sebesar **Rp. 11.437.831.555** atau **95,52%**. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ;

Tabel 3.26
Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Prov.Sumbar
Tahun 2019

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA	%
a. Belanja tidak langsung	5.314.953.288	4.926.868.120	388.085.168	92,70
- Belanja Gaji dan Tunjangan	3.331.245.027	3.035.048.488	296.196.539	91,11
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.983.708.261	1.891.819.632	91.888.629	95,37
b. Belanja langsung	6.658.985.482	6.510.963.435	148.022.047	97,78
- Belanja barang dan jasa	6.501.398.982	6.355.423.985	145.974.997	97,75
- Belanja modal	157.586.500	155.539.450	2.047.050	98,70
BELANJA	11.973.938.770	11.437.831.555	536.107.215	95,52

BAB IV**PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 mencakup 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
2. Rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sebesar 148,74 %. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 4 (empat) indikator kinerja adalah seluruh indikator kinerja kategori penilaian keberhasilannya **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$)
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 6.658.985.482,- direalisasikan sebesar Rp. 6.510.963.435 atau 97,78 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 2,22% atau secara absolute sebesar Rp. 148.022.047,-

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- c. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Menkuatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya